



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROPINSI BANTEN

Dadan Ramdhani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ddn_ramdhani@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze the factors that affect the level of financial disclosure of local government district and city in Banten province's. The views of representatives of the BPK opinion Banten Province. The population used in this research that the local government district or city in Banten province, the research sample of local government financial statements have been audited by local BPK, and then the BPK issued subsequently Inspection Report (LHP) as well as the opinion that LKPD. Sampling techniques using purposive sampling. Types of data used are secondary data, and hypothesis testing using multiple linear analysis. The results showed that the area of wealth, level of dependence, and the amount on education in each region negative significantly influence the level of local government financial statement disclosure, while the size of the area, the complexity of the area, and the expenditure area does not affect the level of local government financial statement disclosure.

Keywords: *SAP, Level disclosure LKPD, Wealth area, Dependency Level Regional, Regional Size, Complexity Regions, Local Shopping, SKPD*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterbukaan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Pandangan para wakil dari BPK berpendapat Provinsi Banten. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah kabupaten atau kota di Provinsi Banten, sampel penelitian laporan keuangan pemerintah daerah telah diaudit oleh BPK setempat, kemudian BPK mengeluarkan Laporan Inspeksi (LHP) selanjutnya serta pendapat bahwa LKPD. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan pengujian hipotesis menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas kekayaan, tingkat ketergantungan, dan jumlah pendidikan di masing-masing daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran wilayah, kompleksitas wilayah, dan daerah pengeluaran tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *SAP, Level disclosure LKPD, Wealth area, Dependency Level Regional, Ukuran Regional, Wilayah Kompleksitas, Belanja Lokal, SKPD*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambil keputusan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Disamping itu, Laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum (Sukhemi, 2011).

Masyarakat memiliki hak dasar untuk mengetahui (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan (Stiglitz, 1999) serta (Silver, 2005) bagaimana organisasi menjalankan aktifitasnya untuk kesejahteraan rakyat (Arsyadi dan Basuki, 2012).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berkaitan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) meliputi empat jenis tingkatan, (1) Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*); (2) Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*); (3) Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*) dan (4) Tidak Wajar (*adverse opinion*). Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam pemeriksaan yang telah dilakukan BPK RI perwakilan Banten diantaranya adalah permasalahan pengelolaan aset tetap, penatausahaan persediaan, pengelolaan pajak dan retribusi, serta mekanisme verifikasi atas kegiatan belanja.

Hilmi dan Martani (2012) meneliti mengenai 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi' dengan menggunakan variabel-variabel seperti kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah asset pemerintah, jumlah penduduk, jumlah SKPD, dan Hasil audit. Sampel yang digunakan oleh mereka yaitu LKPD Provinsi di Indonesia dari tahun 2006 sampai 2009. Hasilnya ditemukan bahwa semua variabel tersebut secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Laporan Keuangan PEMDA. Namun jika dilihat secara parsial hanya variabel kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat penyimpangan saja yang berpengaruh positif signifikan. Sedangkan variabel lainnya tidak signifikan.

Puspita dan Martani (2012) meneliti tentang 'Analisis Pengaruh dan Karakteristik PEMDA Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda'. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel PAD, tingkat Ketergantungan, ukuran PEMDA, kompleksitas pemerintahan dan belanja daerah terhadap pengungkapan dalam *website* PEMDA, apakah sudah disajikan seluruhnya secara baik didalam situs resmi *website* yang dimiliki oleh masing-masing PEMDA. Hasilnya adalah hanya tingkat ketergantungan, ukuran pemda, & kompleksitas pemerintahan yang berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel lainnya tidak ikut mempengaruhi.

Penelitian yang akan dilakukan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2012), namun berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengungkapkan tingkat pengungkapan LKPD yang telah diaudit oleh BPK serta opini apa yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan yang telah disajikan oleh masing-masing pemerintah daerah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni, Martani (2012). Penelitian ini tidak

menggunakan sampel seluruh PEMDA yang ada di Indonesia, melainkan lebih spesifik lagi yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam tahun anggaran 2009-2011.

Penelitian ini sangat penting karena dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi pemerintah daerah Kab/Kota di Provinsi Banten untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK perwakilan Provinsi Banten. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah Provinsi Banten dalam membuat kebijakan akuntansi sektor publik serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya *good governance*.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)

Standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Standar akuntansi pemerintah dalam PP ini dinyatakan dalam bentuk Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). PSAP dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). PSAP dalam PP No. 71 tahun 2010 merupakan SAP transisi dari basis kas ke basis akrual atau biasa disebut *cash toward accrual basis*. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas sedangkan aset, hutang, dan ekuitas dicatat dengan menggunakan basis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71/2010). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian, 2005). SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan diberlakukan SAP dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintah, diharapkan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu, memberikan informasi yang lengkap, akurat dan mudah dipahami berbagai pihak terutama DPR dan BPK dalam menjalankan tugasnya (PP No. 71/2010).

Tingkat Pengungkapan LKPD

Otonomi daerah yang telah dicanangkan sejak 2000 telah memperkuat tugas, wewenang dan hak pemerintah daerah serta meningkatkan anggaran negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Keberadaan Perwakilan BPK di setiap Provinsi antara lain dimaksudkan untuk memeriksa apakah keuangan daerah telah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apakah keuangan daerah telah digunakan secara hemat, efisien dan apakah keuangan daerah telah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pemerintah daerah adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus dilakukan oleh BPK setiap tahun, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksaan Keuangan Negara dimana Gubernur/Bupati/Walikota harus menyampaikan LKPD kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan BPK diberikan waktu selama dua bulan sejak LKPD diterima untuk melakukan pemeriksaan LKPD tersebut.

Pemeriksaan LKPD ditujukan untuk menilai dan memberikan pendapat (opini) apakah LKPD telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam rangka pemeriksaan LKPD, BPK juga melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk transaksi-transaksi yang bernilai signifikan dan rawan KKN. Pendapat atau opini atas LKPD merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Terdahulu

Puspita, Martani (2012) meneliti mengenai Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik PEMDA terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website PEMDA, dengan menggunakan variable rasio PAD, tingkat ketergantungan, ukuran PEMDA, komplektisitas pemerintahan, dan belanja daerah sebagai factor=factor yang mempengaruhi website PEMDA. Hasilnya tingkat ketergantungan, ukuran PEMDA, dan kompleksitas pemerintah berpengaruh positif signifikan, sedangkan variable lainnya tidak ikut mempengaruhinya.

Hilmi dan Martani (2012) meneliti mengenai 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi' dengan menggunakan variabel-variabel seperti kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah asset pemerintah, jumlah penduduk, jumlah SKPD, dan Hasil audit. Sampel yang digunakan oleh mereka yaitu LKPD Provinsi di Indonesia dari tahun 2006 sampai 2009. Hasilnya ditemukan bahwa semua variabel tersebut secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Laporan Keuangan PEMDA. Namun jika dilihat secara parsial hanya variable kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat penyimpangan saja yang berpengaruh positif signifikan. Sedangkan variabel lainnya tidak signifikan

Kemudian Nuraeni, Martani (2012) melakukan penelitian mengenai The Impact of Local Governments Characteristics Toward Their Audit Quality For Financial Reports of 2008-2009. Penelitian ini menggunakan opini dari BPK sebagai variable dependennya, hasilnya yaitu variable *Size, population, types of region*, dan *BPKP assistance* berpengaruh signifikan terhadap opini audit, sedangkan *level of dependence* dan *wealth* tidak berpengaruh terhadap opini audit.

Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran daerah, jumlah SKPD, status daerah sebagai factor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Hasilnya hanya satu variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu variabel status daerah dengan membedakan daerah Kota dan Kabupaten dalam penelitiannya. Sedangkan variabel ukuran daerah & jumlah SKPD tidak berpengaruh.

Pengembangan Hipotesis Penelitian Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah diasumsikan dengan seberapa besar kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatannya, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan daerah yang tinggi cenderung akan memberikan informasi atas laporannya secara penuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menunjukkan kepada para stakeholdernya bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah menghasilkan kinerja yang tinggi dan telah ikut serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2012), menemukan bahwa kekayaan daerah berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan

pemerintah Kabupaten maupun Kota. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan kekayaan daerah yang besar, maka akan semakin besar pula sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kekayaan daerah mungkin memiliki beberapa dampak pada tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan literatur di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Adanya pengaruh antara kekayaan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tingkat ketergantungan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah yang biasa disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin besar pendapatan asli daerah yang dihasilkan suatu pemerintah daerah, maka tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat pun bisa jadi akan lebih kecil.

Puspita dan Martani (2012) menemukan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kota berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kota. Adanya ketergantungan yang besar maka kemungkinan pemerintah pusat melakukan pembatasan operasi pemerintah daerah (Kab/kota) dan meminta pengungkapan lebih untuk memonitor kinerja pemerintah daerah (Kab/kota) dengan pembatasan operasi tersebut. Hal ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat mungkin memiliki beberapa dampak pada tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan literatur di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2 : Adanya pengaruh antara tingkat ketergantungan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Ukuran Daerah

Ukuran daerah digambarkan dengan seberapa besar aset yang dimiliki oleh daerah. Besarnya aset yang dimiliki daerah akan menggambarkan seberapa besar ukuran daerah tersebut. Kabupaten/Kota dengan total aset yang lebih besar akan apakah lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto et al., 2010). Oleh karena itu, pemerintah daerah tersebut akan menaruh perhatian yang lebih tinggi dalam pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Patrick, 2007; Cohen dan Kaimenakis, 2008). Setiap Kabupaten/Kota pasti memiliki jumlah aset yang bervariasi dan berbeda-beda, tergantung dari kemampuan daerah itu sendiri. Daerah yang memiliki pendapatan yang banyak biasanya memiliki total aset yang banyak pula, namun tidak sedikit dari aset-tersebut tidak dipelihara dan dijaga dengan baik.

Penelitian Puspita dan Martani (2012) membuktikan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan. Ukuran daerah disini dinilai dari Jumlah Aset

yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten maupun Kota. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ukuran daerah mungkin memiliki beberapa dampak pada tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan literatur di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3 : Adanya pengaruh antara ukuran daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompleksitas Daerah

Mengutip dari Pasal 28 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa besarnya penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintahnya mengingat fungsi Pemerintah sebagai abdi masyarakat. Ingram (1984) memaparkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan (yang diproksi dengan jumlah penduduk) memberikan dorongan kepada Pemda untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2012) mengatakan bahwa kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan konten *website* Pemda. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi akan menyebabkan *willingness* dari Pemda daerah tersebut untuk mengungkapkan informasi lebih banyak kepada masyarakat tersebut juga tinggi. Berdasarkan literatur di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H4 : Adanya pengaruh antara kompleksitas daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi jumlah belanja daerah, Pemda seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Namun demikian, sebagai daerah dinegara berkembang peranan pemerintah daerah dalam memacu pelaksanaan pembangunan masih haruslah besar, dengan rasio belanja pembangunan yang relative masih kecil maka perlu adanya peningkatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing dan diharapkan semakin besar belanja daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan pada laporan keuangannya.

Puspita dan Martani (2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan dalam *website* Pemda. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemda yang memiliki belanja yang tinggi tidak secara otomatis akan melakukan pengungkapan yang tinggi juga pada *website* Pemda. Menurut penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H5 : Adanya pengaruh antara belanja daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Jumlah SKPD

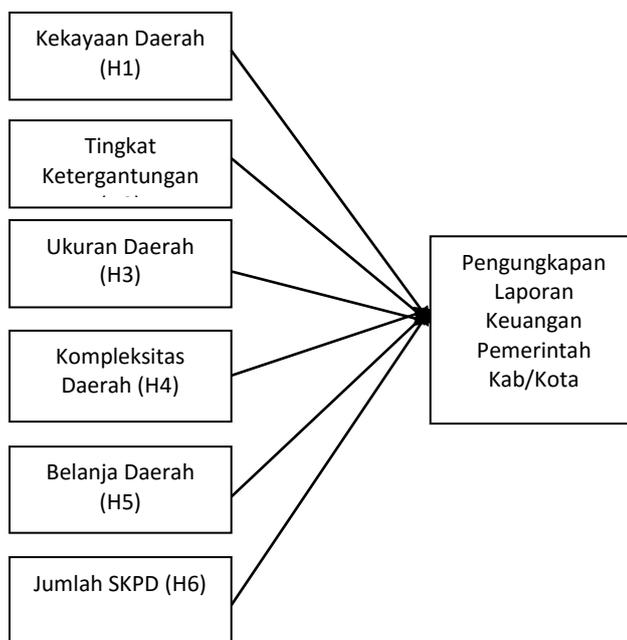
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap daerah memiliki ukuran dan fungsi yang berbeda-beda. Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah (Zulhildi & Martani, 2012). Semakin banyak

urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintahan tersebut melakukan kegiatannya. Semakin besar SKPD yang dimiliki berarti semakin besar pemerintahan dan akan semakin baik pula tingkat pengungkapan yang dilakukan, Damanpour (1991), Patrick (2007). Pengukuran jumlah SKPD dalam penelitian ini menggunakan total seluruh SKPD yang terdapat dalam suatu daerah. Variabel ini digunakan di dalam penelitian Damanpour (1991), Suhardjanto, Yulianingtyas (2011) dan Hilmi, Martani (2012).

Hilmi dan Martani dalam penelitiannya menjelaskan Jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini berbeda dengan hipotesis bahwa jumlah SKPD berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan. Berdasarkan literatur diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H6 : Adanya pengaruh antara jumlah SKPD terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kerangka dan Metode Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis dalam kerangka penelitian diatas diuji dalam sebuah model regresi sebagai berikut ini :

$$\text{DISCLOSURE} = \beta_0 + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{TK} + \beta_3 \text{UD} + \beta_4 \text{KD} + \beta_5 \text{BD} + \beta_6 \text{SKPD} + e$$

Pengukuran untuk operational variabel adalah:

1. Tingkat Pengungkapan LKPD (DISC)= Opini BPK
2. Kekayaan Daerah (KD) = Total PAD/Jumlah Penduduk
3. Tingkat ketergantungan (TK) = Dana Transfer/Total Pendapatan
4. Ukuran Daerah (UD) = Total Aset
5. Kompleksitas Pemerintahan (KP)= Jumlah Penduduk

6. Belanja Daerah (BD) = Total Belanja
7. SKPD (SKPD)= Jumlah SKPD

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Banten. Terdapat 8 pemerintah daerah, diantaranya 4 Kota dan 4 Kabupaten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten yang telah diaudit oleh BPK yang diperoleh dari situs resmi BPK-RI maupun dari kantor BPK-RI perwakilan Provinsi Banten. Pengumpulan data dalam penelitian ini diupayakan untuk memperoleh data dan informasi yang cukup memadai sesuai dengan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan yaitu metode dengan studi pustaka atau literatur melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel dan laporan keuangan pemerintah daerah, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan dan dijadikan sebagai sumber pengumpulan data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan independen dengan menggunakan *software* SPSS versi 20.0 (*Statistical Product and Service Solution*).

HASIL PENELITIAN

Tabel statisti deskriptif dapat dilihat pada table 1 menunjukkan nilai minimum, maximum, rata-rata, dan standar deviasi atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel pengungkapan (DISC) memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 4, nilai rata-rata sebesar 3,25, serta standar deviasi sebesar 0.676. Hal ini menunjukkan tingkat pengungkapan yang dimiliki oleh pemerintah daerah paling rendah sebesar 2 yaitu mendapatkan opini tidak memberikan pendapat dari BPK, dan yang paling besar adalah 4 yaitu opini wajar tanpa pengecualian, dengan standar deviasi sebesar 0,676.

Variabel kekayaan daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 21488,45, nilai maksimum sebesar 657854,87, nilai rata-rata sebesar 150499,9464, serta standar deviasi sebesar 154414,2692. Hal ini menunjukkan tingkat kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah paling kecil sebesar 21488,45, dan yang paling banyak sebesar 657854,87, dengan standar deviasi sebesar 154414,2692.

Pada variabel tingkat ketergantungan (TK) berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan nilai minimum sebesar 0,67, nilai maksimum sebesar 0,96, nilai rata-rata sebesar 0,8344. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan paling kecil sebesar 0,67 dan paling banyak sebesar 0,96 dengan standar deviasi sebesar 0.08344.

Pada variabel ukuran daerah (UD) berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan nilai minimum sebesar 45,31, nilai maksimum sebesar 5968,89, nilai rata-rata sebesar 2678,7729, serta standar deviasi sebesar 1792,35052. Hal ini menunjukkan ukuran daerah yang paling kecil, yang dinilai dari total aset sebesar 45.310.495.830 yaitu terdapat pada pemerintah daerah Kota Serang pada tahun 2009, dan yang paling banyak sebesar 5.968.887.977.129 terdapat pada pemerintah daerah Kab. Tangerang tahun 2009.

Pada variabel kompleksitas daerah (KD) berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan nilai minimum sebesar 349,16, nilai maksimum 3676,68, nilai rata-rata sebesar 1387,3710, serta nilai deviasi sebesar 834,38972. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas daerah yang paling kecil, yang dinilai berdasarkan jumlah penduduk sebesar 349162 terdapat

pada pemerintah daerah kota cilegon pada tahun 2009, dan yang paling banyak sebesar 3676684 terdapat pada pemerintah Kab. Tangerang tahun 2009.

Pada variabel belanja daerah (APBD) berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan nilai minimum sebesar 156,99, nilai maksimum sebesar 2027,97, nilai rata-rata sebesar 1018,1363, serta standar deviasi sebesar 491,29699. Hal ini menunjukkan tingkat belanja daerah yang paling kecil, yang dinilai dari total belanja sebesar 156.994.599.681 yaitu terdapat pada pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009, dan yang paling banyak sebesar 2.027.969.740.162 terdapat pada pemerintah daerah Kab. Tangerang tahun 2011.

Pada variabel jumlah SKPD (SKPD) berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan nilai minimum sebesar 79, nilai maksimum sebesar 400, nilai rata-rata sebesar 236,50. Hal ini menunjukkan jumlah SKPD yang dimiliki oleh pemerintah daerah paling sedikit sebesar 79 dan paling banyak sebesar 400 dengan standar deviasi sebesar 137,684.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil regresi persamaan dapat dilihat pada pada tabel 2 Tabel Uji Koefisien Determinasi terlihat besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,726. Hal ini menunjukkan bahwa 72,6% variasi indeks pengungkapan LKPD (DISC) dapat dijelaskan oleh variable independen, yaitu kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan (TK), Ukuran Daerah (UD), kompleksitas daerah (KD), belanja daerah (APBD) dan Jumlah SKPD (SKPD) sedangkan sisanya sebesar 27,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Pada tabel 3 tampilan Uji ANOVA atau Uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 11,176 dengan tingkat signifikansi 0.000 (signifikan) dengan F tabel sebesar 2.51. Karena F hitung > F tabel, maka model regresi dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kekayaan Daerah

Variabel kekayaan daerah memiliki nilai B sebesar -3,291 dengan nilai t hitung sebesar -3,587 dan nilai *sig* sebesar 0,002. Nilai *sig* sebesar $0,002 < \alpha (0,05)$. Yang berarti bahwa variabel kekayaan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H1 "**diterima**". Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah mampu mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kekayaan daerah yang diperoleh oleh pemerintah daerah Kabupaten maupun Kota, maka dapat memberikan kontribusinya secara maksimal untuk kemakmuran penduduknya, akan tetapi akan semakin sulit juga bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan pemerintah daerah mereka, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sependapat dengan dengan (puspita, martani) (2012), Nuraeni, Martani (2012), Sumarjo (2010), yang mengatakan bahwa Pemda yang memiliki kinerja tinggi untuk memperoleh pendapatan asli daerah yang tinggi tidak secara otomatis akan melakukan kinerja maupun pengungkapan yang baik pula.

Tingkat Ketergantungan

Variabel tingkat ketergantungan memiliki nilai B sebesar -5,237 dengan t hitung sebesar -2,350 dan nilai *sig* sebesar 0,031. Nilai *sig* sebesar $0,031 < \alpha (0,05)$. Yang berarti bahwa variabel tingkat ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan lapran keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H2 "**diterima**". Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan dana transfer lebih dari pemerintah provinsi maka akan

semakin sulit bagi pemerintah daerah tersebut dalam mengungkapkan laporan keuangannya, karena akan semakin banyak yang harus dilaporkan oleh pemerintah daerah tersebut.

Hasil ini sependapat dengan Hilmi, Martani (2012) Ingram (1984) dan Liestiani (2008), yang menolak hipotesis tingkat ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini karena dalam era desentralisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak terlalu erat sehingga tidak ada ada monitoring khusus pelaporan keuangan Pemda oleh Pemerintah Pusat, dan kurang adanya kontrol dalam menentukan dana perimbangan di daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Ukuran Daerah

Variabel ukuran daerah memiliki t hitung sebesar 1,830 dan nilai sig sebesar 0,085. Nilai sig sebesar $0,085 > \alpha (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H3 “ditolak”. Semakin banyak jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak diiringi dengan semakin tinggi juga tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerahnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, masih terdapat pemerintah daerah yang kurang maksimal dalam perhitungan kembali aset yang telah dimilikinya terutama dalam pengelolaan aset tetap dan penatausahaan persediaan. Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi, Martani (2012), yang menunjukkan bahwa aset tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran kepemilikan aset oleh pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan total aset yang banyak, pemerintah daerah cenderung memiliki kualitas pengelolaan aset yang kurang baik, hal ini terlihat dari adanya beberapa temuan BPK mengenai pengelolaan aset khususnya aset tetap yang pada akhirnya memperoleh catatan dari BPK sehingga mempengaruhi kualitas audit dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompleksitas Daerah

Variabel kompleksitas daerah memiliki t hitung sebesar 0,556 dan nilai sig sebesar 0,586. Nilai sig sebesar $0,586 > \alpha (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompleksitas daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H4 “ditolak”. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008), puspita, martani (2012), dan hilmi, martani (2012). Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984), dan Robbins dan Austin (1986). Jumlah penduduk yang diharapkan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam penelitian ini ternyata berbanding terbalik. Jumlah penduduk yang besar tidak diikuti dengan tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Jumlah penduduk dalam penelitian ini tidak mampu mendorong pemerintah dalam mengungkapkan laporan keuangan.

Belanja Daerah

Variabel belanja daerah memiliki t hitung sebesar 0,450 dan nilai sig sebesar 0,658. Nilai sig sebesar $0,658 > \alpha (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H5 “ditolak”.

Hasil ini sependapat dengan penelitian puspita dan martani (2012) yang menjelaskan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan konten, presentase pengungkapan,

dan total pengungkapan website Pemda. Semakin tinggi jumlah belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak secara otomatis akan melakukan pengungkapan yang baik juga. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya belanja daerah yang dilakukan secara tidak efektif dan efisien oleh pemerintah daerah setempat, dan secara keseluruhan belum digunakan untuk pelayanan umum kepada masyarakat.

Jumlah SKPD

Variabel jumlah SKPD memiliki nilai B sebesar -.002 dengan t hitung sebesar -2,390 dan nilai *sig* sebesar 0,029. Nilai *sig* sebesar $0,029 < \alpha (0,05)$. Yang berarti bahwa variabel jumlah SKPD berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H6 "diterima".

Variabel jumlah SKPD memperoleh hasil yang negatif signifikan, hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan SKPD pada masing-masing pemda dapat membantu pemerintah dalam menjalankan pekerjaan pemerintahannya karena akan membuat suatu pemerintahan semakin kompleks dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Akan tetapi dengan jumlah SKPD yang semakin banyak pada suatu PEMDA belum tentu mampu memberikan kontribusi terhadap pemda itu sendiri dengan melakukan pekerjaan yang baik, terutama dalam mengelola anggaran yang dimiliki, karena dengan banyaknya SKPD maka akan semakin sulit bagi pemerintah daerah dalam mengawasi setiap pekerjaan dari masing-masing SKPD yang ada dalam hal pengungkapan laporan keuangannya.

Suhardjanto (2010) berpendapat semakin banyak jumlah SKPD proses kooperasi dan koordinasi antar SKPD akan semakin rumit, kondisi seperti itu akan membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengontrol kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi oleh setiap SKPD. Sehingga akan semakin sulit bagi pemerintah daerah setempat dalam mengungkapkan laporan keuangan dan mendapatkan hasil audit yang baik dari BPK.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan semakin sulit bagi pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya, sehingga akan mempengaruhi pula tingkat pengungkapan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun pengguna informasi laporan keuangan.
2. Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah provinsi maupun pusat, maka cenderung akan membuat daerah tersebut tidak dapat memaksimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah tersebut untuk memaksimalkan PADnya, sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapannya karena akan semakin banyak hal-hal yang harus dilaporkan oleh pemda sebagai pertanggung jawabannya dalam mengelola dana transfer yang diterimanya.
3. Ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah

tidak menjamin akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya. Dengan total aset yang banyak, pemerintah daerah cenderung memiliki kualitas pengelolaan aset yang kurang baik, terlihat dari adanya beberapa temuan BPK mengenai pengelolaan aset khususnya aset tetap yang pada akhirnya memperoleh catatan dari BPK sehingga mempengaruhi kualitas audit dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

4. Kompleksitas daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dapat disimpulkan bahwa banyaknya penduduk tidak mempengaruhi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya.
5. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya. Hal ini disebabkan karena belanja daerah yang dilakukan belum efektif dan efisien untuk pemerintah daerah itu sendiri.
6. Jumlah SKPD berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak SKPD yang terdapat dalam pemerintah daerah belum tentu dapat secara efektif dan efisien dalam mengelola keuangan pemerintah, sehingga akan tidak mempengaruhi kinerja pemerintahan dalam hal meningkatkan pengungkapan laporan keuangan daerahnya.

Penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan memperhatikan keterbatasan penelitian dan saran berikut yang dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini hanya Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Kota yang ada di Provinsi Banten tahun anggaran 2009-2011. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya mungkin dapat memperluas objek penelitiannya agar cakupannya lebih besar lagi.
2. Peneliti lain yang berminat untuk meneliti bidang yang serupa sebaiknya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan PEMDA seperti jumlah pegawai lulusan akuntansi yang bekerja dalam PEMDA, independensi BPK, pengendalian internal pemda.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode waktu yang lebih panjang lagi, karena diharapkan dengan periode waktu yang lebih panjang akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, serta dapat menemukan bukti empiris yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darmastuti, Dewi, Setyaningrum, Dyah. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009. *Jurnal SNA 048 ASPAK 08*. Banjarmasin.
- Giroux, Gary dan Andrew J. McLelland, 2003, 'Governance Structures and Accounting at Large Municipalities', *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, pp. 203-230.
- Ingram, Robert W & Douglas V. De. Jong 1987, 'The Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practices', *Journal of Accounting and Public Policy*, vol. 6, issue 4, pp. 245-269.
- Liestiani, Annisa. 2008. Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. *Skripsi Sarjana. FEUI*. Depok.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*.

- Nuraeni, Martani, Dwi. 2012. The Impact of Local Governments Characteristics Their Audit Quality for Financial Report of 2008-2009. *3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH (3rd ICBER 2012)*. Bandung.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Puspita, Rora, Martani Dwi. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Jurnal SNA 054 ASPAK 18*. Banjarmasin
- Ridha, M. Arsyadi, Basuki, Hardo. 2012. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidak Pastian Manajer, Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal SNA 046 ASPAK 06*. Banjarmasin
- Suhardjanto, Djoko, Yulianingtyas, Rukmita, Rena. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA ASPAK*
- Sukhemi, 2011. Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Volume 8, 2011.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kab/Kota di Indonesia). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Zulhilmi, Amirudin, Martani, Dwi. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Jurnal SNA 053 ASPAK 17*. Banjarmasin

Lampiran Tabel

Tabel 1
Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DISC	24	2	4	3,25	,676
PAD	24	21488,45	657854,87	150499,9464	154414,26916
TK	24	,67	,96	,8344	,08996
UD (dlm milyar rupiah)	24	45,31	5968,89	2678,7729	1792,35052
KD (dalam ribuan)	24	349,16	3676,68	1387,3710	834,38972
APBD (dalam milyar rupiah)	24	156,99	2027,97	1018,1363	491,29699
SKPD	24	79	400	236,50	137,684
Valid N (listwise)	24				

Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,893 ^a	,798	,726	,353

a. Predictors: (Constant), SKPD, KD, TK, APBD, PAD, UD

b. Dependent Variable: DISC

Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

Tabel 4.3
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,376	6	1,396	11,176	,000 ^b
	Residual	2,124	17	,125		
	Total	10,500	23			

a. Dependent Variable: DISC

b. Predictors: (Constant), SKPD, KD, TK, APBD, PAD, UD

Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

Tabel 4.4
Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,833	2,168		3,614	,002
PAD	-3,291E-006	,000	-,752	-3,587	,002
TK	-5,237	2,228	-,697	-2,350	,031
UD	,000	,000	,504	1,830	,085
KD	6,544E-005	,000	,081	,556	,586
APBD	,000	,000	,125	,450	,658
SKPD	-,002	,001	-,424	-2,390	,029

a. Dependent Variable: DISC

Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

